

**PRAKTIK MANAJEMEN PENGETAHUAN PUSTAKAWAN
DALAM MENGEMBANGKAN KOLEKSI LOKAL MAKASSAR
DI DINAS PERPUSTAKAAN KOTA MAKASSAR**

***Literature Knowledge Management Practices In Developing
The Local Collection Of Makassar In The Department
Library of City Makassar***

Irsan

Pustakawan di Perpustakaan Umum Kabupaten Enrekang,

Email : irsanjip@rocketmail.com

Amar Sani

Pustakawan di Perpustakaan H. Bata Ilyas STIE Amkop Makassar

Email : mail@amarsani.name

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai praktik manajemen pengetahuan pustakawan dalam mengembangkan koleksi lokal Makassar di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu praktik manajemen pengetahuan pustakawan dalam mengembangkan koleksi lokal dan pentingnya pengetahuan dalam sebuah organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam proses pengembangan koleksi lokal terdapat praktik manajemen pengetahuan yang dijalankan oleh pustakawan, mulai dari akuisisi pengetahuan, berbagi pengetahuan, hingga pemanfaatan pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan Kota Makassar selama ini mengelola pengetahuan yang diserap dan dicatat melalui proses rapat dan pertemuan informal, menganalisa subjek yang sering dicari pemustaka, dan menerbitkan buku daerah sebagai bagian dari pengembangan koleksi lokal Makassar.

Kata Kunci: Praktik Manajemen Pengetahuan, *Knowledge management*, Koleksi Lokal, *local content*

ABSTRACT

This research is about librarian knowledge management practices in developing local collections of Makassar in Makassar City Library Service. The purpose and benefits of this research are librarian knowledge management practices in developing local groups and the importance of knowledge in an organization. This study uses descriptive qualitative research methods. From the results of this study, it shows that in the process of developing local collections there are knowledge management practices carried out by librarians, ranging from knowledge acquisition, knowledge sharing, to knowledge utilization. It can be concluded that librarians at the Makassar City Library Service have been managing knowledge that is absorbed and recorded through informal meetings and meetings, analyzing subjects that are

frequently searched for by readers, and publishing local books as part of the development of local collections of Makassar.

Keywords: Knowledge Management Practices, Knowledge management, Local Collections, local content

PENDAHULUAN

Transformasi dalam segala aspek dewasa ini semakin dinamis oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK). Perubahan ini membawa manusia memasuki era informasi menuju era pengetahuan. Limpahan informasi yang semakin mudah diakses, menawarkan manusia untuk berkembang dan maju dengan pengetahuan. Tidak hanya manusia secara perseorangan, tetapi juga mempengaruhi organisasi atau institusi sebagai ruang sosial yang memiliki tujuan bersama. Artinya, perkembangan IPTEK meniscayakan organisasi untuk bertransformasi dan terhubung dalam teknologi informasi.

Pada dasarnya manusia dalam organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan merespon perkembangan yang terjadi. Sebab itu, setiap organisasi perlu mendorong sumber daya manusia (SDM) meningkatkan pengetahuan dan menguasai teknologi informasi. Hal ini yang mendasari Alvin Toffler mengkategorikan era informasi (*knowledge age*) sebagai era dimana *mind* (pikiran dan pengetahuan) menjadi faktor penting (Kardi, 2007).

Peter Drucker telah merabab kemunculan era pengetahuan, yang pada tahun 1959 menerbitkan istilah *knowledge worker* untuk menerangkan pentingnya pengalaman dan kecerdasan (otak manusia) dibandingkan keterampilan fisik dan lainnya (Budihardjo, 2017). Menyadari hal itu, banyak perusahaan, hingga organisasi meyakini faktor manusia sebagai unsur yang urgen dalam kompetisi (global) yang berlangsung (Lee, 2018). Modal (pengetahuan) manusia ini pada gilirannya menciptakan organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge management*) atau sering juga disebut organisasi pembelajar (*learning organization*).

Perkembangan IPTEK tersebut mempengaruhi berbagai jenis organisasi dan kondisi lingkungan pekerja, termasuk pada institusi perpustakaan. Perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi dan sumber pengetahuan, sudah barang tentu harus terdepan memanfaatkan sarana tersebut. Iklim yang relevan atau berada dalam lingkungan informasi itu sendiri menjadi modal utama bagi perpustakaan melakukan inovasi dan perubahan. Tentu pengetahuan dan pengalaman (modal intelektual) pustakawan dan para pengelolanya merupakan salah satu aspek yang utama dalam perpustakaan

Berkenaan dengan itu, maka sarana dan lingkungan perpustakaan memberi ruang bagi pengelola perpustakaan untuk berbagi pengetahuan. Peran berbagi pengetahuan sebenarnya juga menjadi tugas dan fungsi adanya perpustakaan. *Knowledge Management is about people, how they create, share and use information* (Christiansen, 2018). Sejalan dengan itu, proses bagaimana menciptakan, berbagi pengetahuan dan menggunakan informasi, juga mendekatkan perpustakaan dalam konsep manajemen pengetahuan.

Dari berbagai sumber, banyak lembaga hari ini yang menyadari akan pentingnya manajemen pengetahuan dalam mengembangkan organisasinya. Hal ini juga disadari oleh pemerintah Indonesia yang ditandai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2011 (Menpan) Republik Indonesia tentang Program Implementasi Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*). Peraturan tersebut disebutkan untuk dijalankan hingga ke pemerintah daerah kabupaten/kota, yang dalam konteks ini mencakup lingkup organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas perpustakaan kabupaten/kota. Meski sudah berlaku sejak tahun 2011, namun keberadaan peraturan menteri tersebut belum seluruhnya diketahui pemerintah daerah.

Menurut Sulistyio Basuki petugas pengembangan koleksi perpustakaan ialah mereka yang menguasai subjek, mengetahui buku dan kebutuhan pemustaka (Basuki: 2011). Kriteria tersebut menandakan bahwa dalam pengembangan koleksi, prosesnya tidak dilakukan secara sederhana.

Biasanya kelompok atau tim yang terbentuk berasal dari kalangan pustakawan, dan biasanya juga melibatkan pimpinan, dan anggota lainnya yang dianggap memenuhi kriteria dan prosedur.

Di Dinas Perpustakaan Kota Makassar, terdapat empat orang pustakawan yang setiap tahunnya terlibat dalam pengembangan koleksi. Pada struktur organisasi, para pustakawan ini tergabung dalam kelompok jabatan fungsional, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan bidang-bidang perpustakaan, termasuk bidang pengembangan bahan pustaka. Sementara mengacu konsep manajemen pengetahuan, Kelompok Kerja Pustakawan dapat diidentifikasi sebagai komunitas praktis (*communities of practice*). Menurut Putu Laxman Pedit (2011), komunitas praktis terdiri dari orang-orang yang memiliki kegiatan atau bidang perhatian yang sama. Mereka secara berkala mengembangkan pengetahuan dan menetapkan arah kerja untuk pengembangan koleksi perpustakaan. Melalui komunitas praktis ini pula, peneliti dapat mengamati praktik manajemen pengetahuan yang terjadi pada proses pengadaan dan pengembangan koleksi lokal Makassar

Pemilihan fokus penelitian pada proses pengembangan koleksi lokal (*local content*), berlatar dari keingintahuan penulis terhadap upaya perpustakaan umum dalam menghimpun khazanah lokal, khususnya koleksi lokal Makassar. Hal ini juga didasari untuk mengetahui respon Dinas Perpustakaan Kota Makassar terhadap Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 22 ayat 2, yang menyebutkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Olehnya secara eksplisit Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang dalam strukturnya adalah juga sekaligus penyelenggara perpustakaan umum, memiliki tanggungjawab dalam menghimpun dan mengembangkan koleksi lokal Makassar.

Perihal kalimat “memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat”, turut memotivasi penulis untuk melihat ke dalam (perpustakaan sebagai fasilitator), yang sebenarnya mengisyaratkan perlunya keberlangsungan praktik manajemen pengetahuan dalam perpustakaan agar menjadi organisasi pembelajar (*learning organization*).

Berdasar perihal diatas, penulis akan mengamati praktik manajemen pengetahuan pustakawan dalam mengembangkan koleksi pustaka lokal Makassar pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar .

KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA (PREVIOUS FINDINGS)

Pengertian Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Di berbagai perusahaan dan organisasi, pengetahuan dijadikan sebagai sumber daya yang mendukung keberhasilan. Hal ini sejalan dengan upaya membangun organisasi yang efektif, bertumbuh, bertahan dan mampu berkelanjutan. Karena itu, banyak lembaga yang ingin tetap eksis di setiap perubahan, kemudian mempelajari dan menerapkan manajemen pengetahuan sebagai hal yang penting.

Andreas Budihardjo (2017: 67) menerangkan definisi manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sistematis atau terstruktur untuk meningkatkan kemampuan organisasi melalui proses pengelolaan pengetahuan baik tacit maupun eksplisit, antara lain berkaitan dengan aktivitas pemerolehan, pentransferan, penyimpanan, pencarian kembali pengetahuan untuk mendukung penciptaan pengetahuan sebagai dasar untuk melahirkan inovasi, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Sementara McShane & Von Glinow dalam Budihardjo (2017) menunjukkan bahwa *organizational effectiveness* bergantung pada proses berbagi pengetahuan, pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan dan pemerolehan pengetahuan. Proses tersebut merupakan siklus yang saling terkait.

Pentingnya penerapan manajemen pengetahuan direspon oleh berbagai disiplin keilmuan, dengan membahas manajemen pengetahuan sebagai aspek yang relevan dalam

mengembangkan organisasi pembelajar, termasuk dalam organisasi perpustakaan dan kepastakawanan.

Perkembangan tersebut selanjutnya merambah ke bidang kepastakawanan yang mulai membicarakannya sebagai kajian baru. International Federation Library Association (IFLA) mendefinisikan manajemen pengetahuan sebagai proses mencipta, menyimpan, membagi, menerapkan, dan menggunakan kembali pengetahuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara menurut Pawit M. Yusuf (2012: 438), manajemen pengetahuan adalah seni dan teknik membangun suatu lingkungan pembelajaran sehingga orang-orang di dalamnya termotivasi secara terus menerus untuk belajar, memanfaatkan informasi yang ada, dan pada akhirnya berbagi pengetahuan dengan orang lain.

Sementara Kardi (2007) memandang konsep manajemen pengetahuan yang menekankan proses penciptaan pengetahuan, penyimpanan, pemindahan dan penggunaan pengetahuan, juga identik dengan aktivitas rutin di perpustakaan dalam mengolah bahan pustaka.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa MP merupakan proses perolehan, penyimpanan, berbagi dan penggunaan pengetahuan dalam organisasi untuk mendukung keberhasilan.

Program implementasi manajemen pengetahuan (*Knowledge Management*) dalam lingkup kebijakan pemerintah Indonesia yaitu melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2011 (Menpan) Republik Indonesia. Adanya upaya pemerintah ini menerapkan manajemen pengetahuan dalam lembaga-lembaga/pemerintah daerah menunjukkan pentingnya *Knowledge Management* bagi organisasi dalam kondisi pemerintahan dewasa ini.

Hal ini juga dapat menjadi landasan bagi pengelolaan perpustakaan umum daerah, yang merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada dasarnya manajemen pengetahuan dalam perpustakaan bukan suatu hal yang baru dalam praktiknya. Namun munculnya konsep manajemen pengetahuan tentu untuk memaksimalkan efektivitas.

Adapun variable dalam Praktik Manajemen pengetahuan dimulai dari penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, kebebasan mengakses pengetahuan, penyebaran pengetahuan dan aplikasi pengetahuan. Praktik manajemen pengetahuan bermula dari pemikiran, lalu dihubungkan dan dikoordinir dalam organisasi untuk efisiensi (Lestari).

Berbagi Pengetahuan dalam *Community of Practice*

Dalam Bahasa Indonesia istilah *community of practices* diartikan sebagai komunitas pelaksana, yakni adalah suatu komunitas yang berada dalam suatu pekerjaan pada suatu organisasi; yang secara berkala mengembangkan pengetahuan dan menentukan cara-cara bekerja untuk mencapai sasaran yang akan dicapai.

Komunitas praktis dalam perpustakaan, salah satunya dapat terbentuk melalui kegiatan pengadaan koleksi. Kelompok ini biasanya dibentuk untuk melakukan pengadaan dan pengembangan bahan pustaka. Anggota yang terlibat dalam kelompok ini ialah pustakawan, pimpinan dan spesialis subjek. Dalam proses pengembangan bahan pustaka, kelompok pustakawan secara solid menentukan peran dan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Biasanya dalam pembentukan tim, anggotanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya perubahan struktur dalam perpustakaan, misalnya pimpinan dinas, bidang dan seksi. Namun bagi pustakawan yang memiliki tugas pokok dalam pengembangan koleksi, tentunya akan selalu terlibat dalam pengadaan bahan pustaka.

Setiap anggota dalam tim itu memiliki peran yang berbeda, tetapi dituntut untuk berpartisipasi aktif. Anggota COPs ini terikat karena dilandasi oleh semangat kebersediaan untuk saling berbagi pengetahuan agar menghasilkan keluaran kegiatan yang maksimal.

Lewat interaksi yang terjalin dalam komunitas, pengetahuan dapat terbagi dan terkelola secara profesional. Untuk itu diskusi yang terbuka dalam mencapai tujuan menjadi kunci keberhasilan.

Hubungan Kepustakawanan dengan Manajemen Pengetahuan

Istilah manajemen pengetahuan (MP) dipandang bukan hal yang baru dalam perpustakaan. Banyak persepsi yang melihat manajemen pengetahuan merupakan bagian yang integral dalam praktik kepustakawanan. Pustakawan dalam International Federation Library Association (IFLA) melihat manajemen pengetahuan adalah corak baru dari kepustakawanan atau manajemen informasi (MI) yang selama ini lazim dikerjakan. Hal ini misalnya disampaikan oleh Loughridge bahwa banyak aspek praktik MP memiliki kemiripan dengan praktik-praktik mapan di kepustakawanan dan manajemen informasi.

Sebab itu, beberapa pendapat mempertahankan bahwa MP adalah nama baru dari kerja pustakawan yang selama ini ditekuni. Argumen tersebut didasari bahwa prinsip kepustakawanan adalah manajemen pengetahuan manusia, yang paling interdisipliner semua disiplin ilmu.

Meskipun demikian, argumen Davenport dalam Pendit (2001) memandang MP berbeda dari kepustakawanan dan MI, karena mencakup penciptaan pengetahuan dan berbagi pengetahuan, dan interaksi pengetahuan tacit dan eksplisit, individu dan kolektif. Sehingga yang menjadi titik utama dari MP ialah sejauh mana proses yang dilakukan oleh manusia dalam menciptakan dan berbagi pengetahuan.

Oleh karena itu, tidak seperti manajemen informasi, belajar sebagai sarana untuk menciptakan/berbagi pengetahuan adalah komponen fundamental dari manajemen pengetahuan. Perbedaan kunci lain antara MP dan IM terletak pada tujuan mereka berbeda. Keberhasilan MP tergantung pada penggunaan pengetahuan disimpan dan dibagi. Namun, tujuan akhir dari sebuah proyek MI dicapai ketika pelestarian dan pengambilan informasi dijamin.

Bagi Lee (2018), sudah saatnya bagi perpustakaan untuk memosisikan ulang diri mereka di tahap utama dan sebagai pemain utama dalam manajemen pengetahuan.

Sementara itu, di tubuh kepustakawanan pengertian manajemen pengetahuan belum sepenuhnya dipahami dan masih dianggap membingungkan. Hal ini bisa dilihat dari Abell dan Oxbrow dalam Pendit (2001), mengidentifikasi para pustakawan belum menganggap konsep manajemen pengetahuan sebagai hal yang integral dalam bidangnya. Ini disampaikannya, dalam hal kurangnya keterlibatan profesional informasi (pustakawan) ikut melakukan transformasi organisasi lewat perubahan kultur kerja dan pembelajaran organisasi.

Blasius Sudarsono juga pernah menyinggung hal ini dengan mempertanyakan sikap pustakawan terhadap manajemen pengetahuan. Sebab bagi Blasius Sudarsono persyaratan petugas perpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo) haruslah berkemampuan dalam mengelola informasi (*information management*) maupun mengelola pengetahuan (*knowledge management*). Sudarsono yang mengutip Holly H. Riccio, mengungkapkan penting bagi pustakawan memiliki kompetensi untuk mengelola pengetahuan pada abad ini.

Sejauh ini belum ada *data base* khusus yang menunjukkan penerapan manajemen pengetahuan di lembaga/institusi perpustakaan yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Walaupun jika sedikit berusaha menelusuri di jurnal kajian perpustakaan, terdapat banyak ulasan yang mengkaji penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Karena itu pula, konsep dan praktik manajemen pengetahuan seharusnya bukan suatu topik yang benar-benar baru bagi dunia perpustakaan.

Di sisi lain, dalam pandangan yang berbeda, justru dikatakannya bahwa manajemen pengetahuan bukanlah hal baru dalam aktivitas perpustakaan. Bahkan dianggap sebagai aktivitas yang akrab dan merupakan istilah lain dari praktik yang selama ini dikerjakan oleh pustakawan. Karena itu pula, peneliti tertarik mengamati praktik manajemen pengetahuan, yang jika mengikuti argument tersebut, dikatakan suatu hal yang selama ini lekat dalam perpustakaan. Secara spesifik, penelitian praktik manajemen pengetahuan akan berfokus pada proses pengembangan koleksi lokal Makassar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mengetahui praktik manajemen pengetahuan pustakawan dalam mengembangkan koleksi lokal di Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Purposive sampel adalah alat yang digunakan untuk pengambilan data. Dalam menganalisis data tersebut, pendekatannya bersifat induktif dalam memperoleh gambaran praktik manajemen pengetahuan pustakawan dalam mengembangkan koleksi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pustakawan terhadap Manajemen Pengetahuan

Dari akar kata istilah manajemen pengetahuan, Tulus Wulan Juni menyatakan pendapatnya terkait manajemen pengetahuan. Menurutnya manajemen pengetahuan ialah sebuah ruang dimana setiap pegawai punya kesempatan menyampaikan gagasan dan inovasi yang dimiliki kepada manajer organisasi. Sehingga ia menganggap manajemen pengetahuan lebih berbicara pada bagaimana kemampuan manajerial pimpinan mengolah pengetahuan (tacit) yang tersimpan dalam setiap pustakawan.

Dalam aktivitas keseharian pustakawan di perpustakaan, ada banyak praktik manajemen pengetahuan yang berlangsung. Tulus mencontohkan misalnya pada saat pustakawan hadir di setiap pertemuan dan rapat, seringkali ia membagi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Karena itu, sejumlah pengetahuan tacit yang dimiliki oleh pustakawan dapat diserap menjadi pengetahuan eksplisit bagi organisasi perpustakaan.

Tulus sendiri menyadari bahwa dalam pertukaran pengetahuan, tidak langsung dapat menghasilkan suatu keputusan bersama. Karakter pengetahuan yang unik dari setiap pustakawan, tidak mudah untuk disatukan dan diputuskan, sehingga membutuhkan kajian dan penelusuran lebih lanjut. Hal demikian biasanya terjadi dalam pengadaan bahan pustaka, termasuk dalam pencarian koleksi lokal.

Selain itu, dikemukakan bahwa dalam menerapkan manajemen pengetahuan ada tantangan berkomunikasi dengan manajer, maupun dalam menyalurkan gagasan di pertemuan formal atau rapat. Apalagi selama ini interaksi dengan pimpinan dalam birokrasi cenderung normatif. Sehingga acapkali ada gagasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pustakawan akhirnya terpendam. Bahkan ia menganggap pola kerja atau struktur yang birokratis bisa menghambat pustakawan menyalurkan gagasan dan inovasinya.

Menurut Tulus, sebenarnya gagasan-gagasan yang ada di dalam birokrasi banyak yang menarik. Tetapi gagasan/pengetahuan tersebut hanya akan tersimpan dalam setiap pegawai, hingga pengetahuan tacit yang dimiliki pegawai hilang karena pensiun, atau disebabkan tidak adanya saluran dan penerimaan untuk menampung pengetahuan. Sehingga untuk mengelola pengetahuan agar berhasil, juga ditentukan oleh kemampuan manajerial. Jika pun manajemen pengetahuan ingin diterapkan, manajer pun perlu memahami bahwa setiap pegawai memiliki gagasan dan inovasi.

Di luar dari implementasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2011 (Menpan) Republik Indonesia tentang manajemen pengetahuan, sebenarnya pegawai di Perpustakaan Umum Kota Makassar telah mengikuti sebuah program yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan.

Program tersebut ialah Innovation Lab, yang digagas oleh *United Nations Development Programs* (UNDP), Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (*BaKTI*) dan Pemerintah Kota Makassar. Melalui program itu, para pegawai dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Makassar berbagi pengetahuan dalam suatu sistem yang dinamakan

laboratorium inovasi. Gagasan dan pengetahuan yang disampaikan melalui medium ini tidak diketahui oleh pimpinan, tetapi dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan dan kebijakan.

Pada dasarnya program *Lab Inovation* yang diikuti oleh Tulus merupakan bagian dari praktik manajemen pengetahuan yang difasilitasi lembaga non-pemerintah. Kehadiran program tersebut tentunya akan memberikan pengetahuan baru bagi pustakawan dalam memahami konsep manajemen pengetahuan. Meskipun praktik MP diterapkan tidak berangkat dari sistem yang dibangun pada tataran internal Dinas Perpustakaan Kota Makassar, tetapi dapat menjadi contoh dan motivasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan secara terencana di dalam organisasi perpustakaan.

Secara umum, dapat dikatakan manajemen pengetahuan merupakan hal yang baru bagi para pustakawan di Kota Makassar, karena itu belum dilakukan berdasarkan konsep manajemen pengetahuan, termasuk pedoman yang telah diatur pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011.

Praktik Manajemen Pengetahuan Pustakawan dalam Mengembangkan Koleksi Lokal

Dinas Perpustakaan Kota Makassar pada setiap tahunnya melakukan pengadaan dan pengembangan koleksi. Sejak tahun 2007 atau semenjak berdirinya, jumlah keseluruhan koleksi yang dimiliki hingga saat ini tercatat sekitar 9.588 Judul/24.072 Eksmplar. Untuk koleksi yang berjenis buku daerah berjumlah 1.293 Judul/ 1.560 Eks, sedangkan khusus *local content* sebanyak 93 judul/160 eksmplar.

Proses pengembangan koleksi perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kota Makassar memiliki prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka yang diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Prosedur yang dijalankan tidak lepas dari prinsip kepastakawanan dalam membangun koleksi yang memadai bagi pemustaka dan mengembangkan layanan perpustakaan. Sehingga prosedur pengembangan koleksi merupakan panduan bagi para pustakawan DPK Makassar mengadakan perencanaan kebijakan pengadaan dan seleksi bahan pustaka. Mereka menganggap pengembangan koleksi ini, prosesnya berkesinambungan dan memiliki tahapan yang panjang.

Sebab itu, pustakawan DPK Makassar menyadari pengembangan koleksi tidak dapat dilakukan dengan sederhana dan serampangan. Dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan dari pustakawan dan pelaksana pengadaan bahan pustaka akan prinsip dan kebijakan pengembangan koleksi.

Dalam SOP yang diterbitkan pada 2017, Dinas Perpustakaan Kota Makassar mengatur kualifikasi pelaksana pengembangan bahan pustaka dengan beberapa kriteria, diantaranya; 1) Pendidikan minimal SMA/Sederajat; 2) Berkompeten dibidangnya; 3) memahami seleksi bahan pustaka; 4) mengetahui prosedur pengadaan bahan pustaka. Meskipun tidak secara mutlak tertuju kepada pustakawan, pada dasarnya kriteria tersebut dimiliki oleh pustakawan yang memang memiliki kompetensi pada bidang kerja tersebut.

Selain berpedoman pada SOP tersebut, pustakawan sebagai profesi tentunya mengacu pada pengetahuan kepastakawanan yang tergambar pada tugas pokok dan fungsinya dalam pengembangan koleksi. Acuan tertulis mengenai tugas ini pada dasarnya merupakan pengetahuan eksplisit bagi pustakawan. Karena kegiatan pengembangan koleksi ini bagian dari tugas pokok fungsional pustakawan, yang dihitung dalam angka kredit kegiatan.

Lazimnya, setiap perpustakaan melakukan persiapan pengadaan koleksi dengan mengumpulkan informasi kebutuhan pemustaka. Untuk melihat kebutuhan pemustaka, tim pengadaan bahan pustaka DPK Makassar melakukan survei kebutuhan pemustaka atau mengecek masukan pemustaka melalui sistem/kotak saran yang disiapkan oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Informasi melalui masukan tertulis itulah yang selanjutnya akan dicatat dan dianalisis oleh pustakawan. Selain itu, informasi juga diperoleh melalui kegiatan survei kebutuhan pemustaka.

Dalam pelaksanaannya, pustakawan dibantu oleh para pengelola taman baca yang ada di kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar. Untuk menggali informasi kebutuhan pemustaka, pustakawan juga secara aktif melihat subjek apa yang sering diakses dan dicari oleh pengunjung perpustakaan dan taman baca, baik secara langsung maupun membuka laporan pada sistem otomasi.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui pula bahwa pengadaan koleksi yang dianggarkan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar sebenarnya tidak hanya diperuntukkan kepada Perpustakaan Umum Kota Makassar, tetapi juga untuk Perpustakaan Balaikota dan Perpustakaan Kelurahan/Kepulauan (sebelumnya bernama Taman Bacaan Kelurahan/Kepulauan atau TBK) yang tersebar di setiap kecamatan. Sehingga pengadaan koleksi berdasarkan survei kebutuhan yang diperoleh dari setiap perpustakaan tersebut.

Kegiatan yang dilakukan tersebut biasanya meliputi usaha mengumpulkan informasi untuk dijadikan sebagai bahan perencanaan dalam menetapkan pengusulan ke tim selektor. Adapun yang menjadi selektor atau tim penyeleksi di Dinas Perpustakaan Kota Makassar diantaranya yaitu pustakawan yang berjumlah empat orang.

Pengumpulan informasi terkait kebutuhan pemustaka/masyarakat diatas merupakan langkah pertama yang dilakukan DPK Makassar. Proses tersebut dianggap penting karena pengembangan koleksi yang kuat tidak terlepas dari informasi kebutuhan pemustakanya. Langkah tersebut dirangkaikan dengan pengumpulan alat bantu yang biasanya digunakan oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan Kota Makassar yakni daftar survey buku yang diminati pemustaka, katalog penerbit, daftar bibliografi, maupun informasi koleksi yang diperoleh dari sumber-sumber lain.

Sumber berupa katalog penerbit biasanya dikirim langsung oleh penerbit sebagai media promosi mereka. Karenanya beberapa penerbit akan mengirimkan katalognya setiap tahun yang memuat terbitan terbaru. Di samping itu, DPK Makassar melakukan inisiatif dengan setiap tahun mengirimkan surat permintaan kepada penerbit untuk dikirimkan katalog atau informasi buku-buku terbaru. Penerbit yang dikirimkan juga menasar pada penerbit lokal yang menerbitkan konten lokal (*local content*).

Hasil pengumpulan alat bantu yang didalamnya memuat informasi daftar buku-buku, selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka. Untuk melihat relevansi kebutuhan tersebut, para pustakawan menimbang dan menganalisa sumber informasi tersebut dalam pertemuan (rapat) tim.

Dalam proses pemilihan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pustakawan memperhatikan beberapa hal yang dijadikan pertimbangan. Menurut Tulus, koleksi yang diadakan selain yang terbaru dan *best seller*, juga memiliki kualitas dan kelengkapan dari subjek yang sama.

Namun karena kebutuhan pemustaka tidak terbatas, terutama karena koleksinya untuk umum, seringkali pengusulan suatu buku tidak dapat terpenuhi. Pemenuhan secara spesifik bisa saja dilakukan namun bergantung pada mekanisme dan tingkat komitmen pustakawan. Artinya proses pengumpulan alat bantu informasi akan menentukan buku yang akan diseleksi. Maka tidak hanya menanti katalog datang atau beracuan pada sumber informasi yang ada, tetapi pustakawan (Tulus) juga aktif mencari informasi koleksi yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya pemustaka, termasuk yang intens ditelusuri yaitu koleksi lokal Makassar.

Proses penelusuran atau pengumpulan informasi itu secara tidak langsung melibatkan praktik manajemen pengetahuan. Sebab di dalamnya terjadi *sharing* (diskusi) tim pengadaan bahan pustaka mengenai informasi yang akan ditelusuri. Proses ini selanjutnya menghasilkan keputusan bersama, serta memperoleh informasi tambahan yang selama ini tersimpan sebagai pengetahuan (implisit) pustakawan. Hasil rapat atau pertemuan juga akan menghasilkan agenda untuk digunakan sebagai instrumen selanjutnya.

Karena itu, kemampuan untuk bertanya, bertukar informasi dan jelajah informasi merupakan kegiatan yang melibatkan pengalaman dan pengetahuan pada sumber mana yang seharusnya dituju. Saat pustakawan bertugas dilayanan, seringkali mereka mendapati pengunjung yang mencari koleksi tertentu untuk dibaca, namun bukunya belum tersedia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tulus, bahwa biasanya ia mengamati apa yang sering dibaca dan apa yang dicari namun tidak ada di perpustakaan. Sehingga pada saat proses pengadaan, sudah terdapat data-data terkait buku apa yang diminati oleh pemustaka.

Proses berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) terkait pengembangan koleksi tidak hanya dilakukan secara formal semata. Sebab biasanya pustakawan memiliki inisiatif untuk melakukan koordinasi secara informal. Interaksi bisa dilakukan pada saat waktu-waktu santai di kantor. Sehingga menstimulasi terjadi percakapan yang menjadi saluran untuk menyampaikan pengetahuan eksplisit maupun implisit.

Pada waktu/momen tertentu, seperti diskusi buku, bedah buku daerah dan pameran buku, pustakawan seringkali mendapat informasi mengenai konten lokal melalui kehadiran penulis dan penerbit di acara tersebut. Informasi inilah yang disimpan oleh pustakawan untuk menindaklanjuti upaya menelusuri koleksi berkonten lokal Makassar.

Ernawati, salah satu pustakawan, secara khusus mencatat penerbit lokal yang menerbitkan konten lokal Makassar. Beberapa penerbit yang pernah dicatat diantaranya Pustaka Refleksi, Pustaka Celebes, To ACCAe, Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, Arus Timur, Pustaka Sawerigading, de Lamacca, Arung Pustaka, dan penerbitan kampus di Makassar.

Catatan yang tersimpan itu selanjutnya memudahkan pustakawan saat akan mengadakan pendataan atau hunting penerbit lokal Makassar. Proses mencatat tersebut menggambarkan praktik manajemen pengetahuan dalam melaksanakan penelusuran koleksi lokal. Sehingga sebenarnya mempersiapkan pengembangan koleksi lokal tidak hanya dilakukan pada saat terbentuknya tim pengadaan bahan pustaka. Dengan data itu, mereka dapat menggunakannya pada saat proses pengadaan dilakukan.

Meskipun pencatatan dilakukan secara tradisional, tetapi cukup membantu pustakawan dalam perolehan dan pemanfaatan pengetahuan. Sebab itu, manajemen pengetahuan tidak mutlak bergantung pada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mencapai efektivitas.

Untuk menggambarkan praktik yang dilakukan dengan konsep manajemen pengetahuan dengan model *organizational effectiveness* (McShane Glinow dalam Andreas), dapat dilihat sebagai berikut:

| Manajemen Pengetahuan | Praktik Manajemen Pengetahuan dalam mengembangkan koleksi lokal Makassar |
|--------------------------------|--|
| Berbagi Pengetahuan | Pustakawan mengadakan pertemuan formal dan informal dalam proses mengumpulkan informasi koleksi lokal Makassar |
| Pemrolehan Pengetahuan | Mengamati apa yang sering dibaca dan apa yang dicari, namun koleksinya tidak ada di perpustakaan |
| Penyimpanan Pengetahuan | Mencatat penerbit lokal yang menerbitkan <i>local content</i> |
| Penggunaan Pengetahuan | Catatan penerbit lokal menjadi alat bantu untuk melakukan pengadaan koleksi lokal Makassar. |

Upaya mengembangkan koleksi lokal di DPK Makassar sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam bentuk pembelian buku. Tetapi pustakawan juga aktif mengajak kepada setiap penerbit lokal agar mau menyimpan karya cetak dan karya rekam hingga ke kabupaten/kota. Walaupun Tulus pun memahami bahwa Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam hanya mewajibkan penerbit menyerahkan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Daerah tingkat Provinsi, yang diberitugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah.

Adanya motivasi untuk melengkapi koleksi lokal sebagai deposit ini tidak lepas dari upaya memenuhi ketersediaan layanan konten lokal Makassar. Apalagi salah satu kewajiban perpustakaan umum daerah kota yaitu sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan

budaya daerah diwilayahnya. Berdasarkan kewajiban tersebut maka sudah sepatutnya pustakawan menghimpun koleksi lokal Makassar.

Proses *hunting* biasanya diawali dengan sosialisasi ke organisasi perangkat daerah (OPD), penerbit untuk karya cetak dan elektronik dan rekaman. Untuk OPD, mereka rutin menyerahkan terbitannya di perpustakaan, seperti kliping berita lokal, buku statistik daerah, hingga buku potensi daerah. Selain itu, karya lokal yang dihunting, selanjutnya akan diadakan atau dicetak oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Dengan menerbitkan ulang karya konten lokal, maka Dinas Perpustakaan Kota Makassar secara tidak langsung mengembangkan koleksi lokal Makassar untuk dimanfaatkan masyarakat. Untuk memperkenalkannya, beberapa karya yang dicetak tersebut diluncurkan dalam acara bedah buku yang diselenggarakan DPK Makassar setiap tahun.

Pada prinsip manajemen pengetahuan sebagaimana yang digambarkan dalam PermenPAN dan RB No. 14 tahun 2011, proses ini dapat digambar sebagai berikut:

1. Perolehan/Akuisisi Pengetahuan, proses ini merekam/mencatat data karya lokal dan menyimpan dalam *database* pengembangan bahan pustaka.
2. Berbagi pengetahuan, menginformasikan kepada setiap tim pengadaan terkait data karya lokal yang tersimpan. Proses ini berlangsung dalam bentuk rapat maupun koordinasi langsung. *Sharing Knowledge* juga terjadi pada acara diskusi Bedah Buku terbitan daerah.
3. Memanfaatkan pengetahuan, proses ini menggunakan informasi yang tersimpan untuk dijadikan sebagai panduan dalam melakukan pencetakan karya lokal.

Selain itu, tujuan dari adanya pencetakan karya lokal didasari karena pustakawan DPK Makassar menganggap koleksi lokal masih kurang. Salah satu tim pengadaan bahan pustaka, Reskawati, mengemukakan bahwa dari jumlah penerbit lokal yang menerbitkan muatan lokal Makassar, dapat dikategorikan masih terbatas. Menurutnya hal itu disebabkan karena masih kurangnya penulis yang menerbitkan muatan lokal Makassar.

Masih kurangnya informasi terkait koleksi lokal Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor yang dikemukakan langsung para pustakawan, sebagai berikut: 1) belum ada wadah yang mempertemukan antara perpustakaan dan penerbit, terkhusus penulis, 2) belum didukung sumber referensi budaya lokal yang memadai.

Belum lengkapnya koleksi lokal juga diakui pustakawan masih bergantung dengan katalog penerbit yang diambil dari Ikatan Penerbit Indonesia Sulawesi Selatan dan penerbit lainnya. Alasan lain disebabkan karena belum maksimalnya pengadaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ernawati bahwa koleksi lokal masih banyak yang belum terakomodir untuk penggandaan dan pengadaan secara maksimal. Di sisi lain, penulis mengamati, *local content* yang telah diterbitkan oleh penerbit-penerbit lokal Makassar ternyata belum seluruhnya terkoleksi di Perpustakaan Umum Kota Makassar.

SIMPULAN

Para pustakawan yang terdiri dari empat orang ini yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pustakawan secara regular mendiskusikan hal-hal terkait pengembangan koleksi lokal. Kelompok Kerja Pustakawan tersebut dapat disebut sebagai *Community of Practice* karena berisi sekelompok individu yang memiliki pengetahuan dan kompetensi pada bidang yang sama.

Untuk bisa mendeteksi koleksi yang membahas tentang Makassar, pustakawan menelusuri koleksi lokal melalui *hunting*, termasuk berinisiatif mencatat informasi dan mengamati kebutuhan pemustaka dari koleksi yang sering dicari pada setiap layanan berlangsung. Pada proses di atas, terdapat pengalaman dan pengetahuan yang disimpan oleh pustakawan yang selanjutnya disampaikan pada setiap pertemuan formal (rapat) maupun informal. Koleksi lokal yang ditemukan informasinya, akan diadakan dan digandakan atau diterbitkan ulang. Agar pengetahuan yang tersimpan dalam koleksi lokal tersebut tersebar dan dimanfaatkan masyarakat, maka DPK Makassar mengadakan bedah/diskusi buku daerah. Dari sana pula pustakawan pun berkesempatan menggali informasi terkait koleksi lokal pada pembicara diskusi yang merupakan penulis buku *local content*.

Kegiatan ini tentunya membutuhkan keterampilan berkomunikasi dengan berbagai elemen, karena tidak semua orang mau dan mampu melakukannya. Namun tentu pustakawan yang punya relasi yang luas akan memperoleh pengetahuan yang terbaru untuk dijadikan sebagai asset organisasi, khususnya dalam pengembangan koleksi lokal.

Akhirnya pengetahuan pustakawan akan menentukan pengembangan koleksi lokal, sebab merekalah yang secara konsisten terlibat didalamnya. Selama itu pula terdapat banyak pengalaman yang tersimpan dari pustakawan yang harus disalurkan untuk kepentingan organisasi dibutuhkan.

REFERENSI

BUKU

- Budihardjo, Andreas. *A Guide Knowledge Management: Efektif Berinovasi Meraih Sukses*. Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2017.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (knowledge management)*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2011.
- Lestari, Baroroh dkk, *Praktik Manajemen Pengetahuan dan Kinerja Inovasi dalam Industri Manufaktur*, Malang: UB Press, 2013.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan* (Jakarta, 2007)
- Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2006.
- Sulistyo-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Jakarta : RI, 1990.
- Yusuf, Pawit M., *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

WEBSITE

- Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) "Sejarah Bakti", *Situs Resmi BaKTI*, <http://bakti.or.id/sejarah-bakti> (14 Januari 2018).
- Chriatiansen, Bernadette, dkk, "Knowledge Managemenet: A Doscovey Process", *Official Website of The MicKnight Foundation*. www.mcknight.org/wp-content/uploads/KM_WhitePaper_FINAL.pdf (Diakses tanggal 10 Januari 2018)
- Kardi, "Revitalisasi Peran Pustakawan dalam Implementasi Knowledge Management", *Visi Pustaka*, vol. 9, no. 2 (Agustus 2007). <http://dev.perpusnas.go.id/magazine/revitalisasi-peran-pustakawan-dalam-implementasi-knowledge-management/> (10 Januari 2018).
- Lee, Hwa-Wei. "Knowledge Management and the Roles of Libraries". <http://www.whiteclouds.com/iclc/cliej/cl19lee.htm> (Diakses tanggal 10 Januari 2018)
- Pendit, Putu Laxman, *Manajemen Pengetahuan dan Profesional Informasi: Harapan, Tantangan dan Kenyataan* (Makalah untuk Kuliah Perdana Program Studi Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok, 18 September 2001), h. 6. http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/24/jbptitbpp-gdl-grey-2001-putu-1155-informasi-kuliah_.doc (Diakses tanggal 10 Januari 2018)
- Sudarsono, Blasius dan Prafita Imadianti, "Pustakawan Memandang Knowledge Management", *Website PDII LIPI*, vol. 33 no. 22 (2012), h. 2. <http://web.pdii.lipi.go.id/baca/index.php/baca/article/view/98>. (Diakses 10 Januari 2018)